

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadinsky, Howard, 2000, *Organized Crime*, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont.
- Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta.
- , 2001, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Seno Adji, SH. & Rekan”, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika Jakarta
- Anwar, Syamsul, 2006, *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat Studi Agama Dan Peradaban (PSAP).
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 2006, P.T. Alumni, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.

-----, 2014, *Teori Hukum: dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.

Greenberg, Theodore S., *et.al.*, 2009, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, Washington.

Hamzah, Andi, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pustaka Larasan, Denpasar

Manthovani, Reda, *et.al.*, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia*, Malibu, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nurdjana, I.G.M., 2005, *Korupsi dalam praktik Bisnis: Pemberdayaan Peneg 117 Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Priyanto, *et.al.*, 2007, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.

- Prinst, Darwin, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta.
- Sadjuri, H. Tarwo, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Pendidikan Pembentukan Jaksa, Jakarta.
- Siahaan, Monang, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, *et.al.*, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suherman, M. Ade, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiaman, A. Gima, 2013, *Manajemen Aset Pariwisata Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*, Guardaya Intimarta, Bandung.
- Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Tresna, R, 2005, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Widoyoko, J. Danang, 2013, *Oligarki Dan Korupsi politik Indonesia: Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Setara Press, Malang.
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
-----, 2013, *Miskinkan Koruptor: Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1660)

C. Jurnal

Ariawan, I Gusti Ketut, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Patrika Vol. 33 No.1, Januari 2008.

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Masa Depan Hukum Pengembalian Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Husodo, Adnan Topan, *Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Husein, Yunus, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Wulansari, Eka Martiana, *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Yusuf, Muhammad, *Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui NCB Asset Forfeiture*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

D. Majalah

Atmasasmita, Romli, *Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik: Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Majalah Varia Peradilan XXVI No. 307 Juni 2011.

Atmasasmita, Romli, *Mengurai Hukum Pembuktian Dalam Perkara TPPU*, Harian Koran Sindo, 2 November 2015.

Mulyadi, Lilik, *Politik Hukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap kesalahan Dan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Varia Peradilan XXVI No. 302 Januari 2011.

E. Makalah

Hussein, Yunus, *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery*, makalah, Jakarta, 4 April 2006.

F. Kamus

Black, Henry Cambell, 1990, *Black's Law Dictionary: Eighth Edition*, West Publishing Co, St. Paul.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

G. Internet

Wikipedia, Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998, [https://id.m.wikipedia.org/wiki>Gerakan-Mahasiswa-Indonesia-1998](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gerakan-Mahasiswa-Indonesia-1998), diakses 29 Oktober 2015.

Wikipedia, Kasus Dugaan Korupsi Soeharto, [http://id.m.wikipedia.org/wiki>Kasus-Dugaan-Korupsi-Soeharto](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kasus-Dugaan-Korupsi-Soeharto), diakses 10 Februari 2016.

Majalah kartini, Gugatan Rp. 4,4 Trilyun ke Soeharto dikabulkan Kejaksaan Siap Eksekusi, [Majalah Kartini.co.id>gugatan-rp-44-trilyun-ke-soeharto-di-kabulkan-kejakung-siap-eksekusi](http://MajalahKartini.co.id/gugatan-rp-44-trilyun-ke-soeharto-di-kabulkan-kejakung-siap-eksekusi), diakses 10 Februari 2016.

Silalahi, Anita, Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, [https://anitasilalahi.wordpress.com>beban-pembuktian-terbalik-dalam-perampasan-aset-pada-tindak-pidana-pencucian-uang](https://anitasilalahi.wordpress.com/beban-pembuktian-terbalik-dalam-perampasan-aset-pada-tindak-pidana-pencucian-uang), diakses 27 April 2016.

Transparency International, Corruption Perception Index 2015, <http://www.ti.or.id/indek.php/publication/2015/corruption-perception-index-2015>, diakses 12 April 2016.

Wibisono, Sonny, Menjerat Koruptor Dengan Asas Pembuktian Terbalik, [http://www.Masyarakat Transparansi Indonesia>Menjerat-Koruptor-dengan-asas-pembuktian-terbalik.html](http://www.MasyarakatTransparansiIndonesia.com/Menjerat-Koruptor-dengan-asas-pembuktian-terbalik.html), diakses 24 November 2015.

DetikNews, Kejaksaan Kaji Kerugian Negara Kasus Soeharto, [m.detik.com > hot > read>2006/05/12](http://m.detik.com/hot/read/2006/05/12), diakses 01 Juni 2016.